



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai IV Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710; Telepon: 021-3449230 Psw. 5704,
(021) 3812684 Surel: ditpa.djpb@kemenkeu.go.id Laman: www.djpb.kemenkeu.go.id

Nomor : S-211/PB.2/2024
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Pengesahan Revisi Anggaran TA. 2024

7 Juni 2024

Yth. 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Kepala KPPN (*terlampir*)
Di Tempat

Sehubungan dengan surat usulan Revisi Anggaran Nomor 2977/SEK/RA1.8/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 hal Usulan Revisi Anggaran TA. 2024, dengan ini kami sampaikan:

- Usulan Revisi Anggaran pada 283 (dua ratus delapan puluh tiga) Satuan Kerja lingkup Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, telah disahkan dan *database* RKA-K/L DIPA pada Kementerian Keuangan telah diperbaharui.
- Dengan pengesahan Revisi Anggaran ini Kode Pengaman (*Digital Stamp*) DIPA Petikan yang digunakan sebagai dasar transaksi berubah menjadi sebagaimana terlampir pada **Lampiran II**.
- Dalam rangka memenuhi kebutuhan administrasi, Kuasa Pengguna Anggaran dan Kepala KPPN agar mengunduh PDF File DIPA Petikan Revisi sebagai dasar untuk mencetak DIPA Petikan Revisi sebagaimana tercantum dalam notifikasi terlampir.
- Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka mewujudkan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, kami berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan memberikan pelayanan secara PASTI: Profesional, Amanah, Solutif, Terpercaya, Inovatif.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Direktur Pelaksanaan Anggaran



Ditandatangani secara elektronik
Tri Budhianto

Tembusan:

- Ketua Mahkamah Agung RI
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
- Direktur Jenderal Anggaran
- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali
- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten
- Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu



8. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh
9. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta
10. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
12. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jambi
13. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
14. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah
15. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur
16. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
17. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah
18. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan
19. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur
20. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara
21. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau
22. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Lampung
23. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku
24. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara
25. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat
26. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur
27. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua
28. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau
29. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
30. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan
31. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah
32. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara
33. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara
34. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat
35. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan
36. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara